

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Arens, A Alvin dan James K. Loebeck. 2009, *Auditing Edisi Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

Harahap, Sofyan. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Penerbit Gautama.

Haryanto. 1997. *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*. Jakarta : Badan Diklat Depdagri.

Hery. 2010, *Potret Profesi Audit Internal*. Bandung : Alfabeta.

Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung : Alumni.

Itjen Depdagri. 1993. *Pedoman Pemeriksaan Reguler Aparat Pengawasan Fungsional di Jajaran Departemen Dalam Negeri*. Jakarta : Depdagri.

Jazim Hamidi dan Mustafa Luthfi. 2011. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Daerah (The Turning Point Of Local Autonomy)*. Malang : UB Press.

Kartono, Kartini. 2002. *Sistem Pengawasan*. Jakarta : Raja Grafindo.

Kusnadi dkk. 1999. *Pengantar Manajemen*. Malang : Universitas
rawijaya.

.2010, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*.



Bandung : PT Rafika Aditama.

Mardiasmo, 2009, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*.

Yogyakarta : Percetakan Andi.

Moerdiono, dkk. 1994. *Birokrasi Dan Administrasi Pembangunan*.

Jakarta : Sinar Harapan.

Moh. Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta : LP3ES.

Muhammad Djafar Saidi. 2009. *Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi*.

Jakarta : Raja Grafindo.

Mulyadi. 2009, *Auditing Edisi Ke-6*. Jakarta : Salemba Empat.

Natsir, Ahmad. 1994. *Pokok-Pokok Materi Pengawasan Aparatut*

Pemerintahan. Ujung Pandang.

Nawawi H. Hudari. 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

Yogyakarta : Gajahmada University Press.

S. Pamudji. 1985. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta :

Bina Aksara

Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi Manajemen*. Jakarta : Ghalia

Indonesia.

Sawyer, Lawrence B. et al. 2005, *Sawyer's Internal Auditing*. Jakarta :

Salemba Empat.

SF. Marbun. 1997. *Peradilan Negara Dan Upaya Administrasi Di*

Indonesia. Yogyakarta : Liberty.

Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*.

Jakarta : Asdi Mahasatya.



Siswanto.2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jukir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.

B. Jurnal

Ahmad, Z., dan D.Taylor. 2009, *Commitment To Independence By Internal Auditor : The 899-925 Effects Of Role Ambiguity And Role Conflict*. *Managerial Auditing Journal*, Vol.24, No.9.

Alim dkk. 2007, *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Varicher Moderasi*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.

Sukriah, dkk. 2009, *Pengaruh Pengalaman Kerja Independensi, Obyektifitas, Integritas, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan*. Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.

C.Dokumen

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001, Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Makassar.

dan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang
dan Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Walikota Makassar Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Inspektorat Kota Makassar.

D. Skripsi

Arter Nus Tamaka, Skripsi: "*Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Studi di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*" (Manado: UNSRAT, 2008).

Wandi Harmawan, Skripsi: "*Analisis Fungsi Inspektorat Kabupaten*

ene Dan Kepulauan" (Makassar, UNHAS, 2014).

nu Wicaksono, Skripsi: "*Pengaruh Independensi Aparat*



Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)” (Surabaya, UNAIR,2013).

E. Makalah

Juanda Nawawi, “*Pengawasan Pemerintahan Di Indonesia*”, Makalah, 2018.

F. Website

http://m.republika.co.id/amp_version/oxasbs354 diakses pada 1 Mei 2018

<http://makassar.tribunnews.com/2017/02/06/sidang-korupsi-pengadaan-brosur-bendahara-dinas-kominfo-makassar-jadi-saksi> diakses pada 10 Mei 2018

<https://fajar.co.id/2018/02/14/akuntabilitas-kinerja-pemkot-makassar-raih-predikat-tertinggi-di-sulsel/> diakses pada 10 Mei 2018

<https://regional.kompas.com/read/2017/07/10/16061201/sewakan.lahan.negara.asisten.1.pemkot.makassar.ditahan> diakses pada 30 April 2018

<https://www.google.com/amp/makassar.tribunnews.com/amp/2017/04/27/asisten-1-pemkot-tersangka-acc-sulawesi-langsung-soroti-kinerja-inspektorat-makassar?espv=1> diakses pada 1 Mei 2018

<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170527/28159094553690> diakses pada 1 Mei 2018

Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi - E-Journal Unsrat PDF [https://ejournal.unsrat.ac.id > viewFile](https://ejournal.unsrat.ac.id/viewFile) diakses pada 5 Mei 2018

Pengaruh Etika, Kompetensi, Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit

[repository.telkomuniversity.ac.id > files](https://repository.telkomuniversity.ac.id/files) diakses pada 5 Mei 2018

h Independensi Dan Kompetensi...(PDF Download



...<https://www.researchgate.net> › publication diakses pada 5 Mei 2018

PENGARUH KEAHLIAN, INDEPENDENSI...- Repository | UNHAS

PDFrepository.unhas.ac.id › bitstream › handle diakses pada 5 Mei 2018


PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI APARAT



...repository.stiesia.ac.id diakses pada 10 Mei 2018



Lampiran-lampiran

1. Surat Bukti Penelitian

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**
INSPEKTORAT
Jalan Teduh Bertasar No. 07 Komplek Gajira Fajar Makassar Kode Pos : 90224
Telepon: (0411) 881550, Fax: (0411) 821595
E-mail: inspektorat_makassar@yahoo.com



SURAT KETERANGAN
Nomor : 3502/Insp/070/XI/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :


Nama : FANNY ANDRIYANI
NIM / Jurusan : E12115305/ Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin

Telah melaksanakan Penelitian di Inspektorat Daerah Kota Makassar berdasarkan Surat dari Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mekassar, Nomor : 070/3060-IL/BKBP/IX/2018 tanggal 5 September 2018, dalam rangka Penelitian Skripsi dengan judul:

" INDEPENDENSI LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DI KOTA MAKASSAR ".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 29 November 2018

an. INSPEKTUR
Sekretaris,

DAHYAL, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730905 199303 1 007

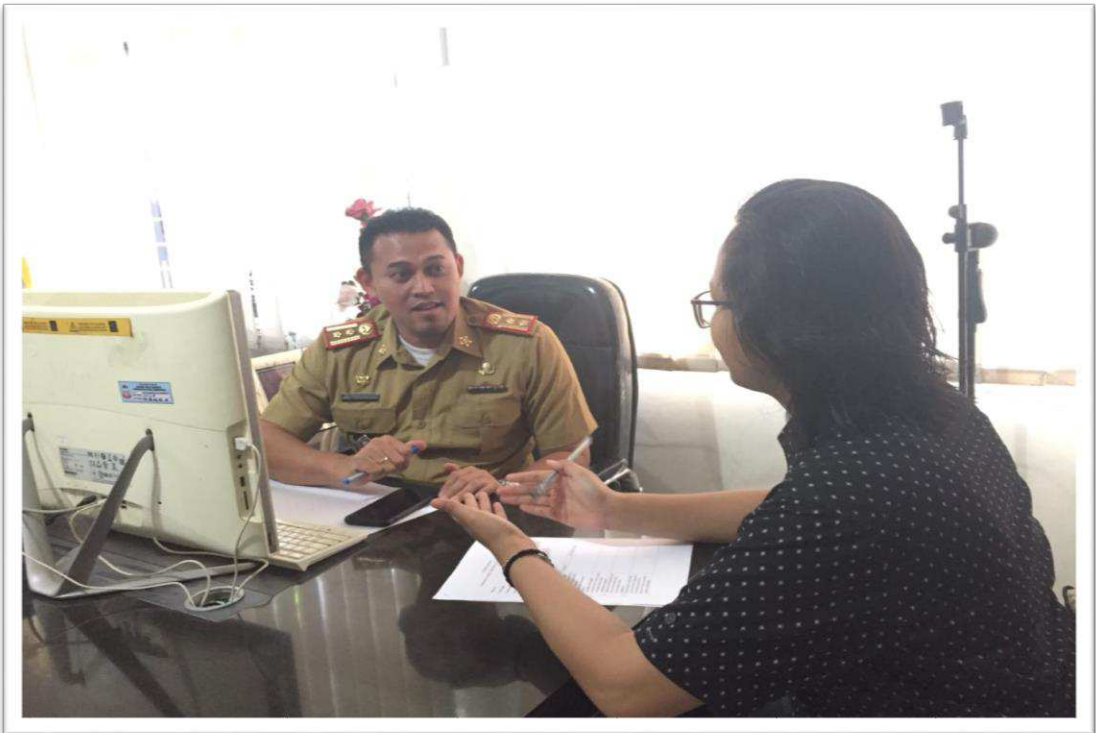
Tembusan :
1. Arsip.



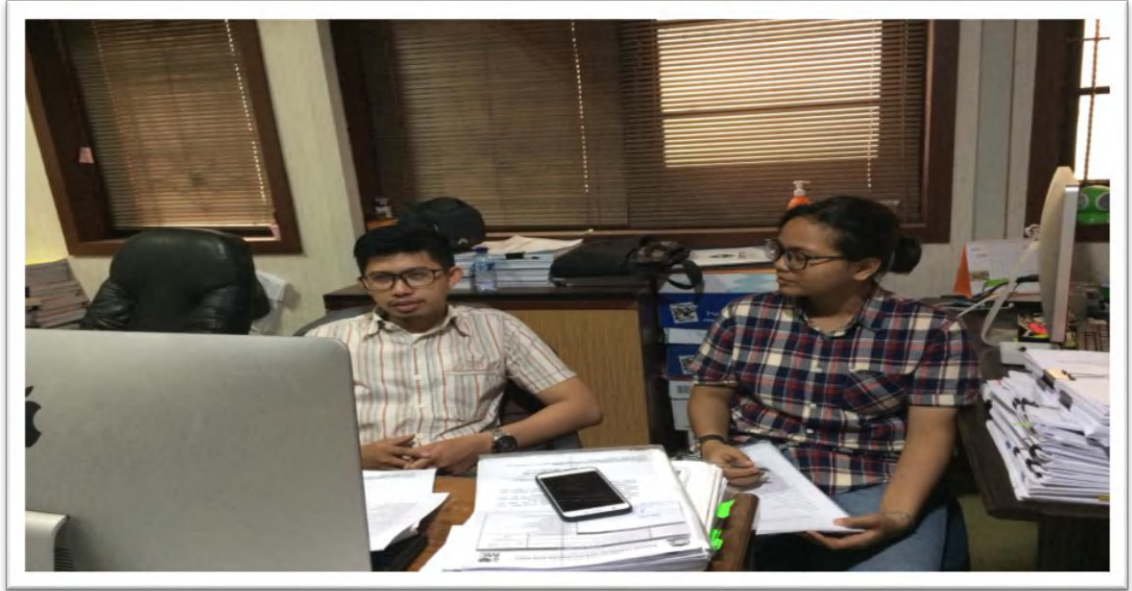
2. Foto-foto Penelitian



Optimization Software:
www.balesio.com



Optimization Software:
www.balesio.com



Optimization Software:
www.balesio.com



Optimization Software:
www.balesio.com



Optimization Software:
www.balesio.com



Optimization Software:
www.balesio.com



Optimization Software:
www.balesio.com



Optimization Software:
www.balesio.com



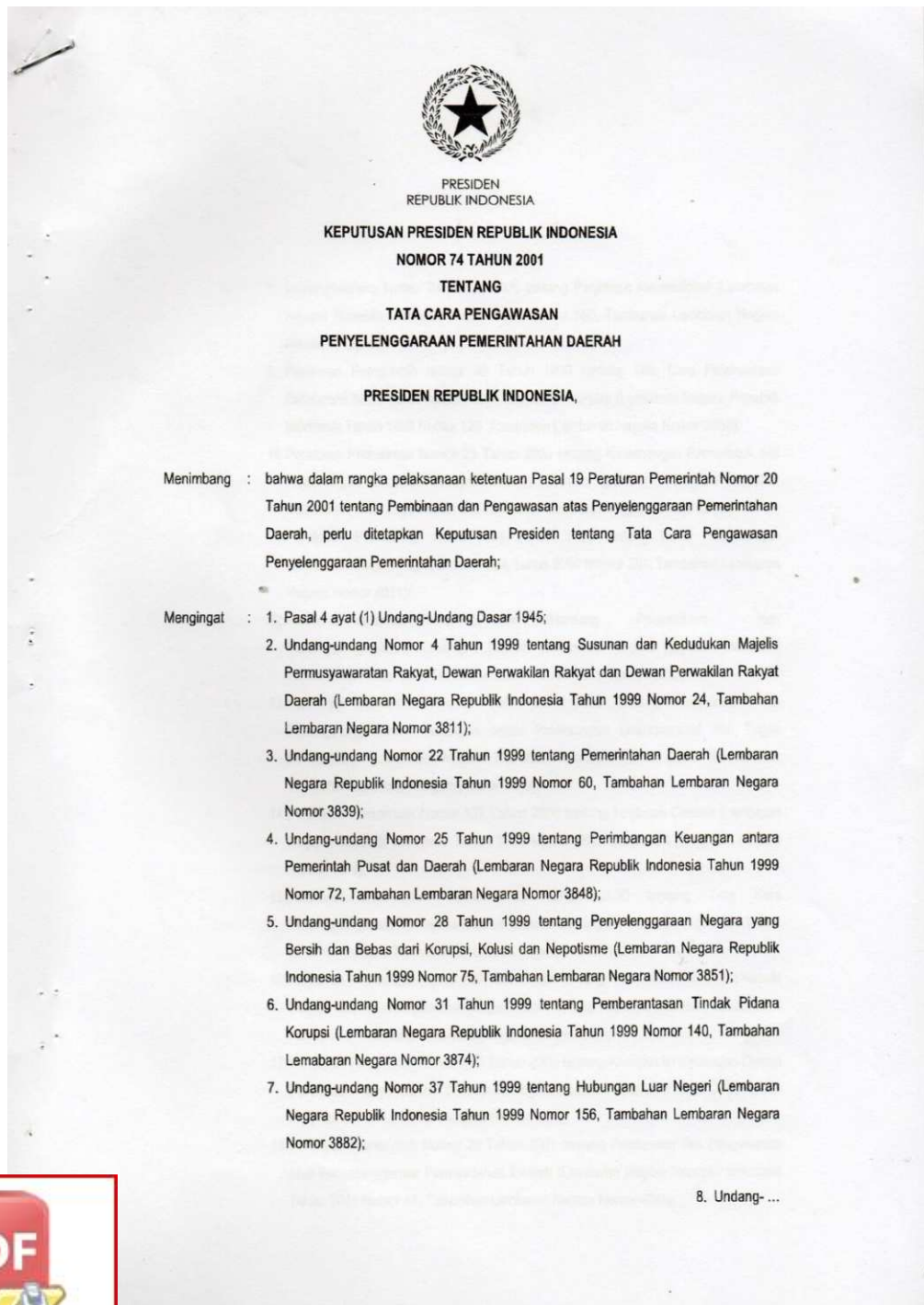
Optimization Software:
www.balesio.com



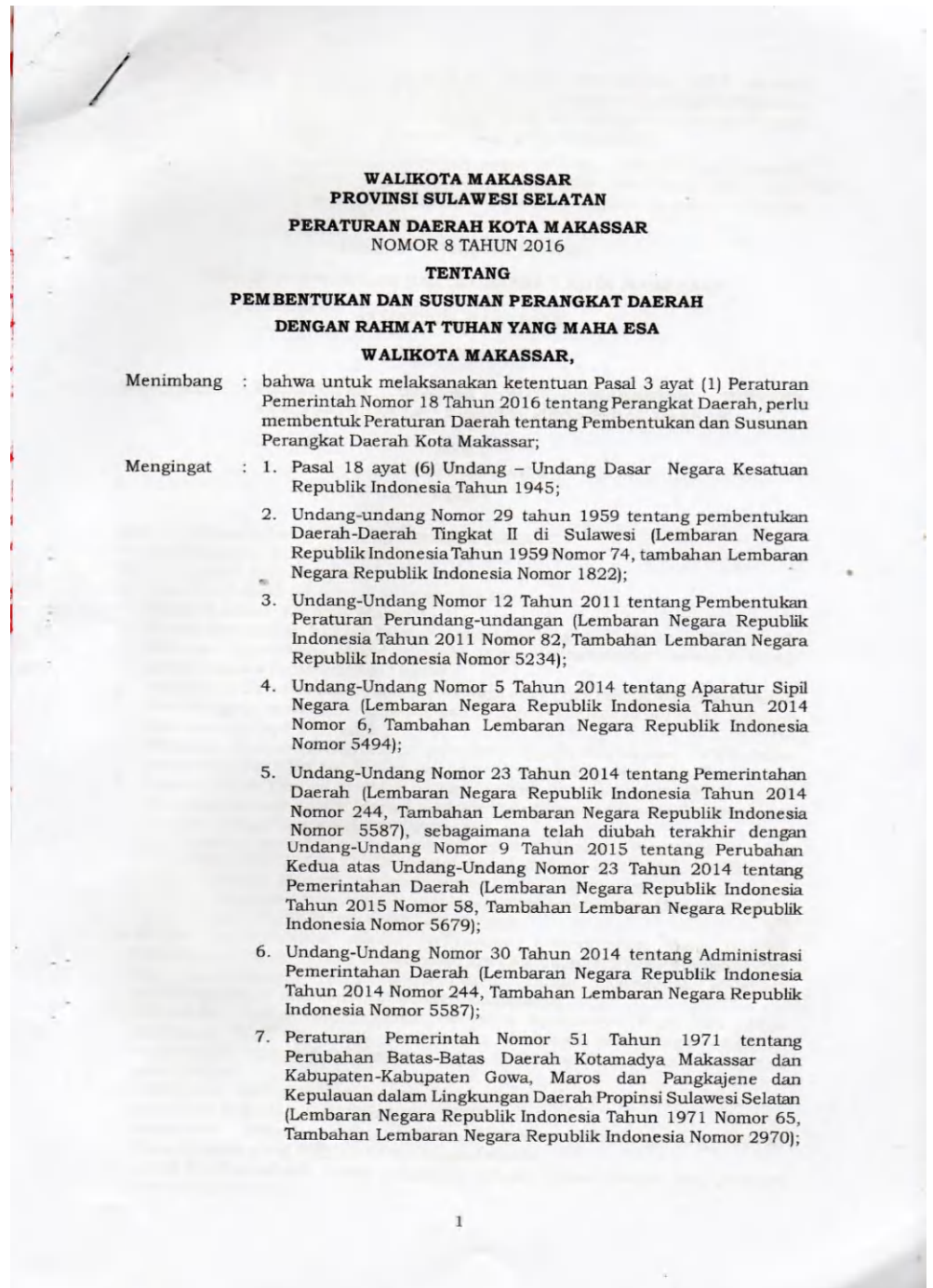
Optimization Software:
www.balesio.com



3. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



4. Lampiran Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Makassar



Lampiran 6 LAKIP Inspektorat Kota Makassar Tahun 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Inspektorat Daerah Kota Makassar telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Capaian 3 sasaran dicapai dengan kategori **sangat tinggi**, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN		SATUAN	RENCANA	PERSENTASE		RATA-RATA
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		TINGKAT CAPAIAN	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET	
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dalam lingkup pemerintah Kota Makassar	1. Persentase hasil tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP	%	55,00	7,28	13,24	
		2. Persentase hasil tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI	%	35,00	39,15	111,86	
		3. Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	
		4. Persentase SKPD yang nilai evaluasi LAKIP-nya CUKUP	%	20,00	92,16	460,80	
		5. Jumlah dokumen SCP pengawasan internal pemerintah	dokumen		1	1,00	100,00
	Persentase Pencapaian Target Sasaran 1						157,18
2.	Meningkatnya kualitas pembinaan sumber daya aparatur pengawas internal pemerintah	1. Cakupan Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya (Persentase pegawai inspektorat Kota Makassar yang bersertifikasi auditor dan pengawas pemerintahan)	%	74,00	68,33	92,34	
							92,34
3.	Meningkatnya kinerja dukungan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum	1. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks	Memuaskan	Memuaskan	100	
		2. Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	90,00	90,00	100	
		3. Persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin berpekerjaan dinas	%	100,00	100,00	100	
		4. Persentase Capaian Kinerja yang termuat dalam Citizen Charter SKPD	%	100,00	100,00	100	
			Persentase Pencapaian Target Sasaran 3				





